

**RELASI KUASA PASCA PIDATO POLITIK PRESIDEN JOKO WIDODO
(Studi Kritis Pada Teks Pidato Politik Presiden Joko Widodo Pada Saat Pelantikan
Presiden 2014)**

Gregorius D Sarin Mau

Universitas Mercu Buana Jakarta

roger_mau@yahoo.com

Abstract. This research aims to discover the meaning of discourse and power implied in President Joko Widodo's political speech at the presidential inauguration on 20 October 2014 and seeks continuity with Michel Foucault's thoughts on discourse and power. Political speech is one application of political communication. Political speech is part of the political rhetoric in which rhetoric is an art activity that is the art of speaking. Joko Widodo is a national leader, and when he speaks he has established a network of actual information and control systems in the community and spread the discourse of knowledge to the public. This research uses a critical paradigm with qualitative approaches and critical discourse analysis research methods. The researcher collects complete information using the procedure of collecting data on research objects and literature studies conducted in the research process. The theory used in this research is Michel Foucault's Discourse and Power theory and the researcher uses Teun van Dijk's critical discourse analysis method to dissect President Joko Widodo's political speech. The results of this study indicate that, in accordance with Foucault's thinking, then president Joko Widodo formed his own discourse and power in the body of society.

Keywords: Discourse, power, political rhetoric, networking, control

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna wacana dan kekuasaan yang tersirat dalam pidato politik Presiden Joko Widodo pada pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 dan mencari kesinambungan dengan pemikiran Michel Foucault tentang wacana dan kekuasaan. Pidato politik merupakan salah satu aplikasi komunikasi politik. Pidato politik merupakan bagian dari retorika politik dimana retorika merupakan aktivitas seni yaitu seni berbicara. Joko Widodo adalah seorang pemimpin nasional, dan ketika dia berbicara dia telah membentuk jaringan sistem informasi dan kontrol aktual di masyarakat dan menyebarkan wacana pengetahuan kepada publik. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian analisis wacana kritis. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur pengumpulan data pada objek penelitian dan studi literatur yang dilakukan dalam proses penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Wacana dan Kekuasaan Michel Foucault dan peneliti menggunakan metode analisis wacana kritis Teun van Dijk untuk membedah pidato politik Presiden Joko Widodo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan pemikiran Foucault, maka presiden Joko Widodo membentuk wacana dan kekuasaannya sendiri di tubuh masyarakat.

Kata Kunci: Wacana, kekuasaan, retorika politik, jaringan, kontrol

PENDAHULUAN

Language is also a medium of domination and power. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa bahasa sesungguhnya mempunyai peranan penting dalam membentuk kekuasaan dan klaim-klaim kebenaran. Jürgen Habermas (Agusta, 2014:xiii) pernah mengisyaratkan bahwa proses-proses politik tidak semata-mata beranyamkan praksis kerja tetapi praksis komunikasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa; bahasa sesungguhnya mempunyai kekuatan untuk membentuk kekuasaan dan membentuk klaim-klaim kebenaran. Bahasa sesungguhnya tidak hanya dibentuk dan ditentukan, tetapi juga membentuk dan menentukan sejarah sosial dan kekuasaan.

Dalam bahasa, kita seringkali mempunyai konsep atau pun juga wacana tertentu terhadap sesuatu. Ketika kita berbicara maka sesungguhnya kita telah membentuk pengertian. Wacana adalah ucapan yang dengannya pembicara menyampaikan segala sesuatu kepada pendengar. Wacana memuat rentetan kalimat yang berhubungan, menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan informasi. Wacana adalah satu peristiwa yang terstruktur diwujudkan di dalam perilaku linguistik (bahasa) atau yang lainnya (Djajasudarma, 2010:3).

Dalam wilayah ilmu sosial kemasyarakatan (cultural studies), pemahaman tentang wacana mendapat pengaruh sangat kuat dari Michel Foucault. Wacana dapat ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari tatkala sekelompok masyarakat berbicara tentang topik tersebut, misalnya dalam percakapan, wawancara, komentar, pidato, tulisan-tulisan, artikel, pengumuman, bagian dari buku dan sebagainya. Tetapi wacana bukanlah sekedar koleksi pernyataan-pernyataan yang tidak dikemukakan secara terbuka, melainkan sekumpulan ujaran-ujaran, kalimat atau pernyataan yang ada atau terjadi dan ditentukan oleh konteks sosial sebagai hal yang memberi sumbangan bagi keberlangsungan konteks sosial tersebut. Dengan demikian lembaga dan konteks sosial memainkan peran yang penting sekaligus menentukan dalam perkembangan, pemeliharaan serta sirkulasi wacana.

Studi wacana Foucault memeriksa pernyataan-pernyataan yang membangun pengetahuan tentang sesuatu hal (misalnya kegilaan), tatanan yang menentukan apa yang bisa dikatakan atau dipikirkan tentang hal-hal tertentu, subjek yang biasa digunakan sebagai contoh dalam wacana tersebut, proses yang dilalui untuk mendapatkan otoritas/kebenaran tentang hal tersebut, praktik-praktik/kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tentang hal tersebut (Barker, 2000:78-79). Bagi Michel Foucault wacana bukanlah sekedar perbincangan sehari-hari, tapi perbincangan yang serius (serious speechact). Serius tidaknya suatu perbincangan diukur berdasar intensitas keterlibatan unsur relasi kuasa dengan pengetahuan yang melahirkan wacana tersebut. Penelusuran arkeologis Foucault tentang analisis wacana, memunculkan sebuah pemahaman kepadanya mengenai peran kekuasaan dalam membentuk pengetahuan. Perkembangan setiap diskursus pengetahuan dilatarbelakangi oleh sebuah sistem yang menopang tersebarnya wacana yang bertahan lama dalam tubuh masyarakat. Analisis Foucault tentang kekuasaan menghantarnya pada sebuah pemahaman yang sama sekali baru.

Kekuasaan menjadi pusat perhatian utama dalam pemikiran Foucault. Menurutnya, keberadaan individu dan masyarakat, serta komponen lain dalam dunia sosial hanya dapat ditelaah melalui hubungannya dengan kekuasaan. Maka kekuasaan dalam pandangannya berbeda dengan makna kekuasaan yang diamini oleh para teoretikus yang lainnya. Bagi Foucault (Martono, 20014:47), kekuasaan bersifat divergen atau menyebar, ia tidak berada di satu tempat (dalam aktivitas politik atau ekonomi saja). Kekuasaan selalu muncul dan membentuk sistem kontrol. Bagi Foucault, kekuasaan dan wacana adalah saling berkaitan. Kekuasaan yang berada di mana-mana menciptakan berbagai wacana yang mampu mempengaruhi praktik sosial sehari-hari. Kekuasaan mengatur persebaran wacana

kebenaran sekaligus membentuk pengetahuan tentang kebenaran yang mendukung pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan dan wacana adalah saling berhubungan dan membentuk klaim-klaim kebenaran. Kebenaran membentuk realitas yang diterima secara umum. Berlakunya kebenaran sebagai sesuatu yang diterima secara umum tidak dapat terlepas dari peran wacana yang disebarkan kekuasaan. Dalam wacana terdapat sebuah sistem pengetahuan yang dapat memberikan informasi mengenai teknologi sosial maupun teknologi memerintah yang merupakan bentuk kekuasaan dalam tubuh masyarakat modern.

Wacana adalah sebuah konsep yang mengandung pengetahuan yang dapat disebarkan melalui kekuasaan. Wacana dapat disebarkan melalui pidato. Pidato politik merupakan salah satu medium persebaran wacana. Dalam ilmu komunikasi, pidato merupakan sebuah alat komunikasi politik karena di dalam pidato tersirat konsep-konsep atau pun pengetahuan-pengetahuan tertentu yang mempunyai daya persuasif yang akan mempengaruhi masyarakat. Wacana dan kekuasaan yang tersirat dalam pidato politik presiden Joko Widodo diturunkan melalui komunikasi dan upaya untuk memberikan efek persuasif kepada masyarakat pun dipertukarkan melalui proses komunikasi. Komunikasi meliputi politik karena politik melibatkan pembicaraan yang luas, sehingga hakikat aplikasi atau pengalaman politik adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang (Arifin, 2003:2). Komunikasi sesungguhnya juga melintasi bidang kajian politik hal ini disebabkan karena politik juga meliputi pengaruh di samping kekuasaan dan wewenang.

Pidato politik merupakan salah satu medium dalam komunikasi politik. Melalui kegiatan komunikasi politik maka terjadilah pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup negara sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan politik atau kesadaran warga dalam hubungan kenegaraan. Muller merumuskan komunikasi politik sebagai hasil yang bersifat politik dari kelas sosial, pola bahasa, dan pola sosialisai. Sedangkan Galnoor (Arifin, 2003:9) menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial dimana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran. Agar pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan Joko Widodo dapat mempengaruhi masyarakat, maka peran kekuasaan sangatlah dibutuhkan. Joko Widodo adalah seorang yang terpilih untuk memimpin bangsa Indonesia. Dengan demikian, Joko Widodo mempunyai peran dalam menjalankan kekuasaan dan memproduksi kekuasaan serta kebenaran dalam tubuh masyarakat. Sesuai dengan peran kekuasaan yang disampaikan oleh Michel Foucault, tentunya Joko Widodo juga mampu menciptakan sistem kontrol dalam setiap ucapannya.

Pidato politik adalah bagian dari retorika politik di mana retorika adalah sebuah kegiatan seni yaitu seni berbicara. Retorika tidak hanya merupakan kegiatan antarpersonal tetapi berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa melalui pidato kepada banyak orang (Arifin, 2003: 66). Retorika politik atau pidato politik sebagai suatu seni berbicara sesungguhnya mempunyai daya persuasi politik yang sangat tinggi dengan menggunakan bahasa lisan. Dengan berpidato kepada khalayak secara terbuka akan berkembang wacana publik dan berlangsung proses persuasi. Dalam berpidato, pilihan dan penggunaan kata dan kalimat sangatlah penting agar pesan mampu dimengerti dan diterima banyak orang sehingga khalayak mampu menyerap ideologi yang terdapat di dalam pidato tersebut (Massoud dan Elahe, 2015:349). Dalam berpidato sebagai presiden tentunya Joko Widodo menciptakan wacana dan menyebarkan konsep serta pengetahuan kepada masyarakat yang mendengarkannya. Semua itu tak dapat terjadi jika tak ada campur tangan dari kekuasaan yang dimilikinya. Sesuai dengan pernyataan Foucault bahwa wacana adalah sesuatu yang mampu mempengaruhi praktek hidup sosial sehari-hari dan wacana adalah praktek pemaknaan bahasa. Ketika presiden Joko Widodo membentuk sebuah wacana, maka

dengan sendirinya presiden Joko Widodo juga membentuk sebuah pengetahuan yang dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat selama masa kepemimpinannya.

Wacana yang dibangun Joko Widodo mempengaruhi kekuasaan dalam kepemimpinannya dan menjadi sebuah tolok ukur dalam menjalankan masa kepemimpinannya. Di dalam wacana atau praktek diskursif yang diungkapkan Joko Widodo sesungguhnya ada jalinan hubungan antara bahasa, pikiran, pengetahuan dan tindakan yang mempromosikan kehidupan-kehidupan tertentu dari kehidupan sosial yang akan dimanifestasikan dalam masa kepemimpinannya. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian terhadap teks pidato politik presiden Joko Widodo pada saat pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. Peneliti menggunakan teori Michel Foucault tentang wacana dan kekuasaan serta menganalisis pidato pelantikan presiden Joko Widodo menggunakan cara analisis Teun van Dijk untuk menemukan makna wacana dan kekuasaan yang tersirat dalam pidato presiden Joko Widodo sesuai dengan kacamata Foucault. Dalam pembahasan ini, penulis mencoba untuk menemukan makna wacana dan kekuasaan yang dibangun oleh presiden Joko Widodo dalam pidato politiknya dan bagaimana presiden Joko Widodo memainkan kekuasaannya sesuai dengan apa yang dikatakannya dalam pidatonya dengan praktek kekuasaannya dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) konsep manakah yang membangun makna wacana dan kekuasaan dalam pidato politik presiden Joko Widodo? Bagaimana pidato pelantikan presiden Joko Widodo membangun makna wacana dan kekuasaan? Bagaimana konteks wacana dan kekuasaan diaplikasikan dalam kepemimpinan Joko Widodo

KAJIAN TEORI

Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Ilmu komunikasi politik bukanlah ilmu yang baru melainkan merupakan ilmu yang sudah lama dikembangkan dan diteliti. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah.". Nimmo (2000:8) melukiskan dengan singkat bahwa politik adalah pembicaraan, atau kegiatan politik adalah berbicara. Politik pada hakekatnya kegiatan orang secara kolektif sangat mengatur mereka dalam kondisi konflik sosial.

Menurut Gramsci (Sugiono, 1999:31), di dalam komunikasi politik terdapat pesan yang menghegemoni: agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan "hegemoni" atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensual. Dalam konteks ini Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni sebagai suatu bentuk supermasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supermasi lain yang ia namakan "dominasi" yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik.

Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana hegemoni menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah. Faktor terpenting sebagai pendorong terjadinya hegemoni adalah faktor ideologi dan politik yang diciptakan penguasa dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membentuk pola pikir masyarakat. Dalam berkomunikasi ketika seorang pemimpin berbicara tentunya terdapat wacana dan ideologi yang terserap di dalam isi pembicaraannya. Wacana yang disampaikan sesungguhnya mempunyai sebuah kekuatan untuk membentuk sebuah hegemoni dalam tubuh masyarakat. Hegemoni merujuk pada

sebuah dominasi dalam artian dominasi kepemimpinan. Hegemoni lebih merujuk pada dominasi kekuasaan dimana seorang penguasa menguasai yang dipimpinnya. Bentuk penguasaan yang didominasi terhadap kelompok tertentu lebih menggunakan moral dan intelektual.

Almond dan Powell (Arifin, 2003:9) menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agresasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik. Komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi yang lain. Sedangkan Galnoor menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik yaitu suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial dimana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk dalam peredaran.

Salah satu bentuk komunikasi politik adalah retorika politik. Kata 'retorika' berasal dari bahasa Yunani yang berarti kecakapan berpidato. Secara etimologis retorika bisa dikatakan sebagai kecakapan berpidato pembicara publik yang terbiasa berkata-kata. Dewasa ini kata retorika disinonimkan dengan speech, oral communication dan public communication (Maarif, 2015:1). Retorika politik atau pidato politik sebagai suatu seni berbicara memiliki daya persuasi politik yang sangat tinggi, dengan menggunakan bahasa lisan indah. Retorika pada dasarnya menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato. Keberhasilan pidato sangat ditentukan oleh pembicara atau yang biasa disebut sebagai komunikator politik yang dikenal sebagai orator.

Konsep Wacana

Wacana adalah praktek pemaknaan bahasa. Bahasa adalah aspek sentral dari penggambaran suatu subyek dan lewat bahasa ideologi terserap didalamnya. Wacana merupakan cara atau pendekatan yang digunakan individu untuk memahami dunia (sosial). Dalam *The Order of Things : An Archaeology of Human Sciences*, Foucault menjelaskan bahwa wacana dimaknai sebagai representasi dirimelalui tanda-tanda verbal dan manifes. Wacana dapat diganti dengan bahasa atau speech (Martono, 2014: 40).

“...beneath the established signs, and in spite of them, he hears another, deeper, discourse, which recalls the time when words glittered in the universal resemblance of things; in the language of the poet, the Sovereignty of the same, so difficult to express, eclipses, the distinction existing between signs.....beneath the language of signs and beneath the interplay of their precisely delineated distinctions, he strains his ears to catch that ‘other language’, the language, without words or discourse, of resemblance.” (Foucault, 1989: 40) (...di bawah tanda-tanda yang mapan, dan disamping mereka, dia mendengar orang lain, lebih dalam lagi, wacana, yang menghadirkan waktu ketika kata-kata berkemilau dalam kemiripan benda-benda universal; dalam bahasa penyair, kedaulatan yang Sama, demikian sulit untuk diungkapkan, memudar, distingsi yang ada diantara tanda-tanda.... di bawah bahasa tanda dan di bawah kesalingpengaruh distingsi mereka yang secara tepat digambarkan, dia menekan telinganya untuk mendengar ‘bahasa lain’, bahasa. Tanpa kata atau wacana, kemiripan.)

Wacana merupakan refleksi mengenai perbedaan bentuk budaya, kebiasaan, adat, dan pengetahuan, kemudian wacana juga menjadi bagian periode sejarah. Foucault berpendapat bahwa wacana dapat diidentifikasi dan dibedakan dengan lembaga atau aspek lain dalam masyarakat.

Wacana merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan (statement). Pernyataan adalah atom diskursus (wacana) (Foucault, 1989: 80). Bagi Foucault wacana atau diskursus merupakan cara bagaimana dunia menampakkan dirinya. Foucault memperkenalkan sebuah acuan konseptual pengamatan yang dalam bahasa Perancis yang ia sebut dengan:

enonce. Enonce merupakan unit paling elementer dan paling verbal yang dapat dilihat untuk menandai munculnya dan tersebarnya suatu gugus diskursif baru. Kata enonce ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata *statement* (untuk selanjutnya disebut kata *statement*).

Korelasi Wacana dan Kekuasaan

Wacana dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Gagasan mengenai kekuasaan dalam karya Foucault adalah jawaban atas persoalan bagaimana dan mengapa formasi-formasi diskursif (wacana) berubah (Maksum, 2008:322). Kekuasaan menjadi muncul dimana-mana, sejauh interaksi sosial berlangsung. Interaksi sosial itu berlangsung melalui wacana. Interaksi sosial mengandung kekuasaan untuk mendominasi pemaknaan dan penciptaan wacana serta memerangi wacana yang lainnya (Augusta, 2014:15). Pengertian akan kekuasaan diatur melalui berbagai wacana yang berguna dan terbuka. Mengenai pengaruh wacana terhadap kekuasaan, Foucault (1993:25) menyatakan demikian: *Not a collective curiosity or sensibility; not a new mentality: but power mechanisms that functioned in such a way that discourse...* (Bukan keingintahuan atau kepekaan kolektif; bukan pula pola berpikir baru; melainkan berbagai mekanisme kekuasaan sangat memerlukan wacana untuk dapat berfungsi). Wacana dan kekuasaan adalah saling berkaitan. Kekuasaan yang berada dimana-mana menciptakan berbagai wacana dan mampu mempengaruhi praktek sosial sehari-hari. Kekuasaan dan wacana saling berhubungan dalam membentuk klaim-klaim kebenaran. Kekuasaan dan pengetahuan terjalin untuk menghasilkan wacana dalam waktu dan ruang tertentu, dalam setiap periode sejarah (Martono:2014:50).

Kekuasaan mendominasi realitas sehingga suatu hubungan antara wacana dan praktik yang satu dengan yang lainnya selalu menunjukkan kekuasaan penafsir terkuat. Dalam wacana, kekuasaan adalah pengaruh penting tingkah laku manusia. *Discourse are tactical elements or blocks operating in the field of force relations, there can exist different and even contradictory discourses within the same strategy; they can, on the contrary, circulate, without changing their form from one strategy to another, opposing strategy* (Foucault,1993:100) (Berbagai wacana merupakan unsur-unsur atau blok-blok taktik di wilayah hubungan kekuasaan. Mungkin saja ada perbedaan dan bahkan kontradiksi di dalam satu strategi yang sama. Sebaliknya keduanya dapat berfungsi tanpa berubah bentuk di antara berbagai strategi yang bertentangan).

Wacana berperan dalam penyebaran pengetahuan sekaligus membentuk kekuasaan atas masyarakat (Jorgensen, 2007:26). Di dalam wacana, pengetahuan dan kekuasaan saling berkaitan sebagai unsur yang rasional dengan aneka ragam strateginya. *Indeed, it is in discourse that power and knowledge are joined together. And for this very reason, we must conceive discourse as a series of discontinuous segments whose tactical function is uniform nor stable. To be no more precise, we must not imagine a world of discourse divided between accepted discourse and excluded discourse, or between dominant discourse and the dominated one; but as a multiplicity of discursive elements that can come into play in various strategies* (Foucault, 1993:98). (Jelas di dalam wacanalah kekuasaan dan pengetahuan saling berkaitan. Karena itulah, kita harus memahami wacana sebagai sederet segmen tersinambung, yang fungsi taktisnya tidak seragam ataupun stabil. Lebih jelasnya, jangan membayangkan satu model wacana yang terbagi di antara wacana yang diterima dan wacana yang ditolak atau di antara wacana yang mendominasi atau didominasi; tetapi bayangkan wacana sebagai unsur-unsur nalar, yang dapat bermain dalam aneka ragam strategi).

Wacana tentang orang sakit dan orang sehat, orang gila dan orang waras, penjahat dan bukan penjahat adalah konstruksi dari pengetahuan yang serentak didalamnya termanifestasi dominasi jaringan kekuasaan. Penyebaran pengetahuan ditopang dengan adanya praktek kekuasaan yang tersebar dalam institusi-institusi seperti rumah sakit, sekolah dan penjara yang membentuk setiap individu untuk menerima klaim wacana tersebut sebagai sesuatu yang dapat diterima sebagai kebenaran.

Wacana sebagai Teknologi Persebaran Kekuasaan

Kekuasaan bekerja melalui wacana. Wacana adalah medium persebaran kekuasaan. Wacana membentuk kekuasaan. Kekuasaan memproduksi wacana yang berkembang dalam satu zaman tertentu dan membentuk sebuah model pengetahuan pada zaman tertentu. Teknologi persebaran adalah sebuah cara penyebarluasan wacana dalam tubuh masyarakat. Umumnya penyebaran wacana ini dilakukan dalam teknik pembatasan perkembangan wacana dimana wacana dikontrol dan dibatasi demi terciptanya kekuasaan dalam periode tertentu. Hal ini dilakukan melalui tiga cara yaitu larangan, pemisahan dan penolakan dan terhadap kehendak akan kebenaran. Wacana adalah alat penerapan kekuasaan. Mengenai hal itu, Foucault (1993:101) menyatakan demikian: *Discourse transmits and produces power; it reinforces it, but also undermines and exposes it, renders it fragile and makes it possible to thwart it...* (Wacana menyampaikan dan menghasilkan kekuasaan; wacana memperkokohnya sekaligus mengikisnya, memaparkannya, membuatnya rentan dan memungkinkannya untuk dihambat). Wacana berperan dalam memproduksi kebenaran berkaitan dengan apa yang disebut salah dan apa yang disebut benar.

Sebelum abad pertengahan, kebenaran dari sebuah wacana tidak terletak pada apa yang dikatakan melainkan pada siapa yang mengatakan dan bagaimana itu dikatakan. Namun pada abad berikutnya, sekitar abad pertengahan, kebenaran dari sesuatu terletak pada apa yang dikatakan dan bukan pada apa yang dibuat. Kebenaran telah bergerak dari enunsiasi, tindakan ritual menuju ke pernyataan menurut pengertian dan referensinya terhadap dunia. Perubahan pandangan tentang yang benar dan yang salah ini berarti bahwa wacana yang benar tidak selamanya dibatasi oleh pelaksanaan kekuasaan. Pengetahuan juga turut berperan dalam pembentukan wacana tentang yang benar. Foucault (1993:96) menyatakan bahwa: *...different forms of discourse, self-examination, questionings, admissions, interpretations, interview, were the vehicle of a kind of incessant back and forth movement of forms of subjugation and schemas of knowledge.* (Berbagai bentuk wacana, mawas diri, interogasi, pengakuan, penafsiran, wawancara, dalam gerak bolak-balik tanpa henti menyampaikan berbagai bentuk penundukan dan skema pengetahuan). Kekuasaan mensyaratkan kedekatan, mengandalkan pemeriksaan fisik dan pengamatan yang sangat cermat; menuntut pertukaran wacana, melalui berbagai pertanyaan yang mengorek pengakuan, dan curahan hati yang lebih interogasi. Wacana merupakan unsur-unsur atau blok-blok taktik di wilayah hubungan-hubungan kekuasaan.

Wacana adalah Medium Kekuasaan

Wacana memiliki kaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan kekuatan yang melatarbelakangi kemunculan suatu wacana dan penyebarannya dalam masyarakat. Kekuasaan berperan memproduksi wacana dalam masyarakat yang berfungsi mempertahankan persebaran kekuasaan dalam satu masa tertentu. Bagi Foucault (Santosa, 2002:116), "Tidak mungkin ada pelaksanaan kekuasaan tanpa wacana kebenaran."

Foucault menunjukkan dengan jelas bagaimana kekuasaan tak terlepas dari persebaran wacana. Kekuasaan mengontrol persebaran wacana dengan berbagai bentuk pembatasan dan larangan yang diciptakan serta penerapan berbagai aturan dan pemisahan.

Pengaruh kekuasaan terhadap persebaran wacana menjadikan setiap wacana berkembang dalam bingkai pembatasan tertentu baik dari segi pembicaraannya maupun pelaksanaannya. Hal ini diungkapkan oleh Foucault (1993:216) dalam pidato inagurasinya yang berjudul *Discourse on Language: I am supposing that in every society the production of discourse is at once controlled, selected, organised and redistributed according to a certain number of procedures, whose role is to avert its powers and its dangers, to cope with chance events, to evade its ponderous, awesome materiality.* (“Dalam setiap masyarakat munculnya wacana selalu dikontrol, diseleksi, diorganisir dan didistribusi menurut sejumlah prosedur yang berfungsi untuk menghindari kuasa dan bahaya-bahayanya, untuk menguasai hal-hal yang tak terbayangkan, mengelakkan kepicikan atau materialitas yang lemah”).

Wacana berfungsi menopang persebaran kekuasaan. Persebaran wacana seks menopang persebaran kekuasaan dalam lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, kedokteran dan hukum. Menurut Foucault (1993:116), wacana diproduksi, diakumulasi, disirkulasi serta difungsikan oleh kekuasaan dengan tujuan untuk menopang berdirinya lembaga sosial: *in a society such as ours, but basically in any society, there are manifold relations of power which permeate, characterise and constitute the Social body, and these relations of power cannot themselves be established, consolidated nor implemented without the production, accumulation, circulation and functioning of a discourse.* (“Dalam suatu masyarakat seperti masyarakat kita, juga pada masyarakat lainnya, terdapat berbagai macam hubungan kekuasaan yang mengabadikan, mencirikan dan membentuk lembaga sosial, dan hubungan kekuasaan ini tidak dapat dengan sendirinya dibangun, dikonsolidasikan maupun diimplementasikan tanpa adanya produksi, akumulasi, sirkulasi dan pemfungsian wacana”). Dengan demikian, kekuasaan semakin ditopang persebarannya dalam tubuh masyarakat dengan adanya persebaran lembaga-lembaga sosial yang berperan memproduksi wacana yang dominan.

Wacana dan Kekuasaan saling Mengkonstruksi

Kekuasaan yang dipahami oleh Foucault adalah Kekuasaan, dengan huruf besar, sebagai himpunan lembaga dan perangkat yang menjamin kepatuhan warga negara dalam suatu negara tertentu. Kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah penundukan yang berbentuk aturan, juga sebagai dominasi global yang dilakukan oleh satu unsur atau kelompok atas yang lain. Foucault (1993:92) menggambarkan pemahamannya demikian:

By power, i do not mean “Power” as a group of institution and mechanisms that ensure the subservience of the citizens of a given state. By power, i do not mean, either, a mode of subjugation which, in contrast to violence, has the form of the rule. Finally, I do not have in mind a general system of domination exerted by one group over another, a system whose effects, through successive derivations, pervade the entire social body. (“Kata kekuasaan yang saya maksud bukan Kekuasaan sebagai himpunan lembaga dan perangkat yang menjamin kepatuhan warga negara dalam suatu negara tertentu. Saya juga tidak mengartikannya sebagai suatu cara penundukan yang berbentuk aturan sehingga berbeda dengan kekerasan. Terakhir, saya tidak memahami kekuasaan sebagai suatu sistem dominasi global yang dilakukan oleh suatu unsur atau kelompok atas yang lain dan yang karena disalurkan secara berturut-turut, dampaknya melanda masyarakat seutuhnya”).

Dalam kacamata Foucault, kekuasaan dilihat sebagai sebuah transformasi dari praktek tirani menuju sebuah praktek pendisiplinan. Kekuasaan bertransformasi menjadi lebih efektif dan efisien atau dikenal dengan istilah ekonomi kekuasaan. Ekonomi kekuasaan adalah hasil dari korelasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Kekuasaan menjadi lebih bersifat produktif berkat adanya relasi dengan pengetahuan. Wacana dan kekuasaan saling melengkapi satu sama lain. Wacana membantu kekuasaan agar dapat

bekerja dengan lebih efektif. Dan sebaliknya, kekuasaan menjamin terbentuknya pengetahuan melalui relasi-relasi kekuasaan yang tersebar dalam masyarakat lewat wacana. Wacana mengkonstruksi kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan mengkonstruksi wacana.

Pelaksanaan kekuasaan berperan membentuk wacana dan wacana tersebut sekaligus berperan dalam menopang pelaksanaan kekuasaan dalam tubuh masyarakat. Wacana dan kekuasaan saling mengandaikan satu sama lain. Pelaksanaan kekuasaan selalu mengandaikan kehadiran wacana dan sebaliknya dalam setiap wacana selalu diandaikan adanya kekuasaan yang menyertainya. Wacana berperan dalam penyebarluasan pengetahuan sekaligus membentuk kekuasaan atas tubuh masyarakat (Jorgersen, 2007:26). Wacana tentang orang sakit dan orang sehat, orang gila dan orang waras, penjahat dan bukan penjahat adalah konstruksi dari pengetahuan yang serentak didalamnya termanifestasi dominasi jaringan kekuasaan.

Foucault memahami wacana sebagai sekelompok pernyataan yang memiliki batas, pembagian, transformasi dan temporalitasnya sendiri. Wacana yang berkembang senantiasa berubah dari masa yang satu ke masa yang lain bergantung pada dominasi wacana melalui persebaran praktek diskursif. Persebaran wacana mempengaruhi persebaran pengetahuan oleh karena wacana merupakan artikulasi dari pengetahuan. Dengan kata lain, Pengetahuan hanya dapat diketahui dan berkembang dalam tubuh masyarakat dengan mengambil bentuk wacana. Wacana berperan membentuk gagasan-gagasan, hasrat dan gambaran dari setiap individu. Dengan demikian, setiap periode sejarah menghasilkan pengetahuan tertentu yang berperan membatasi dan mempengaruhi pemikiran individu.

Wacana berperan menyebarkan pengetahuan dalam kaitannya dengan produksi kebenaran. Dalam hal ini, Foucault melihat kebenaran berperan dalam menentukan penerimaan sebuah pengetahuan dalam masyarakat. Kebenaran membentuk kriteria-kriteria tertentu sebagai pengetahuan yang benar atau yang keliru yang disebutnya sebagai sebuah rezim kebenaran. Foucault (1993:73) mencatat hal ini demikian:

“Each society has its regime of truth, its "general politics" of truth: that is, the types of discourse which it accepts and makes function as true; the mechanisms and instances which enable one to distinguish true and false statements, the means by which each is sanctioned; the techniques and procedures accorded value in the acquisition of truth; the status of those who are charged with saying what counts as true. (“Setiap masyarakat memiliki rezim kebenarannya sendiri, suatu “politik umum” kebenaran: yakni tipe-tipe wacana yang diterima dan difungsikan sebagai sesuatu yang benar; berbagai mekanisme dan instansi yang memungkinkan orang membedakan pernyataan-pernyataan yang benar dan keliru, dimana setiap penilaian itu memiliki sanksinya sendiri-sendiri; teknik-teknik dan prosedur yang mencatat nilai dalam buku besar kebenaran; memberikan status bagi mereka yang berani mengatakan sesuatu yang dianggap benar”).

Perkembangan wacana dalam periode waktu tertentu berperan membentuk pengetahuan. Wacana menopang persebaran pengetahuan dalam tubuh masyarakat. Pengetahuan diterima sebagai sesuatu yang benar dan menentukan pola pikir dan pola tindakan dalam satu masyarakat. Perkembangan wacana berperan menopang persebaran pengetahuan yang pada saat bersamaan pula membentuk lapisan epistemik masyarakat (Martono, 2014:56). Foucault (1990:313) menunjukkan hubungan antara pengetahuan dan episteme dalam analisisnya mengenai perkembangan wacana kegilaan. Kegilaan ditampilkan sebagai kesatuan diskursus medis yang diskriminatif dan represif dengan berbagai pola aturan khusus yang menopang persebaran wacana kegilaan.

The unity of the discourses on madness is not founded on the existence of the object "madness," or on the constitution of a unique horizon of objectivity; it is the series of rules

which make possible, during a given period, the appearance of medical descriptions (with their object), the appearance of a series of discriminatory and repressive measures (with their particular object), and the appearance of a set of practices codified in prescriptions or medical treatments (with their specific objects).... Over and above the unity of discourses on madness, it is the pattern of the rules which define the transformations of these different objects, their nonidentity through time, the break that is produced in them, and the internal discontinuity that suspends their permanence. (“Kesatuan-kesatuan diskursus kegilaan tidak ditemukan dalam eksistensi obyek “kegilaan” atau perlakuan suatu kesejajaran obyektifitas yang unik; ini adalah serangkaian aturan yang memungkinkan selama periode tersebut; adalah serangkaian penampakan deskripsi medis (dengan obyek mereka), penampakan serangkaian ukuran yang diskriminatif dan represif (dengan obyek mereka yang spesifik). Dan penampakan seperangkat praktik perlakuan medis atau resep (dengan obyek tertentu mereka)...Di atas semua kesatuan diskursus tentang kegilaan itu, ada pola aturan-aturan yang mendefinisikan transformasi semua obyek yang berbeda ini, sesuatu yang bukan identitas mereka dalam periode waktu, kehancuran yang dihasilkan dalam semua diskursus itu, serta diskontinuitas internal yang menggoyahkan kekokohan mereka”).

Wacana berperan membentuk pernyataan-pernyataan bermakna dalam rentang waktu historis tertentu sebagai sebuah pengetahuan dengan mekanisme pengaturan yang sangat rapi.

Analisis Wacana Kritis Teun van Dijk

Analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa atau penggunaan bahasa. Menurut Van Dijk (1995:24), analisis wacana merupakan proses analisis terhadap bahasa dan penggunaan bahasa dengan tujuan memperoleh deskripsi yang lebih eksplisit dan sistematis mengenai apa yang disampaikan. Cook (1992:1) menjelaskan bahwa analisis wacana tidak cukup hanya menganalisis unsur kebahasaan saja, akan tetapi memperhitungkan konteks yang membangun wacana tersebut. Menurut Van Dijk, penelitian atas analisis wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktek produksi yang harus juga diamati. Disini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga dapat memperoleh pengetahuan kenapa teks bisa seperti itu.

Mengenai analisis wacana, dalam bukunya yang berjudul “Aims of Critical Discourse Analysis,” Van Dijk (1995:17) mengatakan:

Critical Discourse Analysis (CDA) has become the general label for study of text and talk, emerging from critical linguistics, critical semiotics and in general from socio-politically conscious and oppositional way of investigating language, discourse and communication. As is the case many fields, approach, and study disciplines in language and discourse studies, however, it is not easy precisely delimit the special principles, practices aims, theories or methods of CDA. (Analisis Wacana Kritis (CDA) telah menjadi label umum untuk studi teks dan pembicaraan, muncul dari linguistik kritis, semiotika kritis dan pada umumnya dari sosio cara politik conscious dan oposisi menyelidiki bahasa, wacana dan komunikasi. Seperti halnya berbagai bidang, pendekatan, dan disiplin studi dalam studi bahasa dan wacana, namun, tidak mudah justru membatasi prinsip-prinsip khusus, praktek tujuan, teori atau metode CDA)

Dalam analisis wacana yang digambarkan oleh Van Dijk, ada tiga dimensi atau bangunan yang mendasari sebuah wacana yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis model Van Dijk adalah menggabungkan tiga dimensi wacana tersebut dalam satu kesatuan analisis. Dimensi teks yang diteliti bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial, dipelajari

proses produksi teks yang melibatkan kognisi individu. Sedangkan aspek konteks mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Analisis Van Dijk menghubungkan analisis tekstual ke arah analisis yang komperhensif bagaimana teks diproduksi, baik dalam hubungannya dengan individu, wartawan dan masyarakat.

Teks menurut Van Dijk terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang saling mendukung yang terdiri dari struktur. Pertama, struktur makro yaitu makna global atau umum dari teks. Kedua, superstruktur yaitu kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup dan kesimpulan. Ketiga, makna suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai dalam suatu teks.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori wacana dan kekuasaan Michel Foucault dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis Teun van Dijk pada level atau dimensi teks. Obyek dalam penelitian ini adalah wacana dan kekuasaan yang terkandung dalam pidato politik presiden Joko Widodo pada saat pelantikan presiden 2014. Wujud data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan kalimat. Adapun data dalam penelitian ini berupa kata, metafora, kalimat, dan paragraph yang terdapat pada teks pidato Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan presiden 20 oktober tahun 2014. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data verbal yaitu teks pidato Presiden Joko Widodo. Sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini berupa kamus, buku, jurnal dan dariinternet. Teori analisis atau model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori wacana dan kekuasaan dari Michel Foucault. Sedangkan pendekatan analisis teks Teun van Dijk khusus pada level teks. Dalam penelitian ini, rangkaian analisis data dilakukan dalam beberapa tahap dengan rujukan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh van Dijk. Tahapan-tahapannya menggunakan satu dimensi saja yaitu dimensi teks yang terdiri dari: super struktur, struktur makro dan struktur mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Super Struktur dalam Teks Pidato Politik Presiden Joko Widodo

Skematik pada penelitian ini mengacu pada wacana secara keseluruhan di mana peneliti mengambil beberapa ungkapan-ungkapan penting yang membentuk sebuah wacana dan manifestasi kekuasaan.

1. Baru saja kami mengucapkan sumpah, sumpah itu memiliki makna spritual yang dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar.
2. Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global.
3. Saya ingin menegaskan, di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan, dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

4. Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Peneliti melihat skema atau alur dari bagian pembuka pidato, isi pidato hingga penutup pidato atau awal pidato sampai pada bagian akhir pidato dimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga menjadi satu kesatuan akhir yang kemudian dapat memberikan kesimpulan tentang wacana dan kekuasaan dalam teks pidato pelantikan presiden Joko Widodo.

Struktur Makro dalam Teks Pidato Politik Joko Widodo

Persatuan menjadi wacana utama dalam pidato presiden Joko Widodo, agar wacana itu dapat direalisasikan maka kerja sama, kerja keras dan gotong royong harus dipupuk. Joko Widodo menekankan sebuah kerja keras dalam kebersamaan yang harus sesuai dengan kehendak bersama, kehendak rakyat dan kehendak konstitusi. Penekanan tema pidato pelantikan presiden Joko Widodo terdapat beberapa ungkapan di mana Jokowi menyerukan agar semua elemen masyarakat dapat bekerja sama. Adapun salah satu ungkapan Joko Widodo yang menyiratkan tentang persatuan dan gotong royong adalah “Kini saatnya, kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya, bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.” Ungkapan ini menegaskan mengenai apa yang menjadi pusat perhatian presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinannya dimana Joko Widodo menyatakan persatuan dan kerja sama.

Struktur Mikro dalam Teks Pidato Politik Presiden Joko Widodo

1. Semantik

Latar: Joko Widodo dalam menyampaikan pidatonya mengungkapkan latar belakang atau alasan dan tujuannya dalam berpidato demi kelangsungan Indonesia di masa kepemimpinannya dalam waktu 5 tahun yang akan datang.

Detail: Joko Widodo memberikan informasi yang bersifat persuasif kepada khalayak umum mengenai visi dan misinya yang tersirat dalam pidatonya dimana didalamnya terdapat kontrol informasi kepada masyarakat. Dengan demikian secara tidak langsung kekuasaan bekerja melalui wacana yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo dalam pidato yang disampaikannya.

Maksud: Jokowi menyampaikan fakta-fakta secara gamblang dan tanpa tersembunyi agar secara eksistensial Indonesia tetap berada pada fakta dimana Indonesia adalah negara maritim, negara yang berdemokrasi, negara yang luas akan peradaban budaya, dan sebagainya.

Pra anggapan: Jokowi juga berusaha meyakinkan masyarakat dalam pidatonya yang akhirnya mampu mempengaruhi masyarakat dimana ia membangun citra dirinya dalam masyarakat sehingga mampu meyakinkan masyarakat. Jokowi memberikan pernyataan yang dipandang terpercay dan tak perlu disangsikan lagi.

2. Sintaksis

Dalam menyampaikan pidatonya, presiden Jokowi menggunakan koherensi sebab akibat dan koherensi penjelas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ungkapan yang disampaikan presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya. Penggunaan kalimat aktif menjadi salah satu ciri bentuk kalimat yang digunakan Jokowi dalam pidato pelantikannya. Tanpa meninggalkan prinsip kausalitas, Jokowi memberikan efek

persuasif kepada para pendengarnya. Kata ganti yang sering dipakai Jokowi adalah kita. Hal ini menunjukkan posisi Jokowi sebagai penguasa sekaligus yang ingin bergotong royong dengan rakyat.

3. **Stilistik**

Dalam menyampaikan pidatonya, peneliti menemukan bahwa presiden Jokowi cenderung memilih kata atau kalimat yang bersifat persuasif dengan tujuan dapat memberikan efek yang dapat mempengaruhi masyarakat. Dalam beberapa ungkapan, presiden Jokowi menggunakan kalimat argumentasi dan deskripsi. Dalam teks pidato pelantikan presiden Jokowi, gaya penulisan teks pidatonya terdiri dari persuasif, argumentasi dan deskripsi.

4. **Retoris**

Dalam pidatonya Jokowi juga sempat memberikan beberapa ungkapan yang memiliki makna tersirat: bekerja keras, persatuan, gotong royong, keterbelahan, keterpecahan, memanggul mandat, kehormatan, martabat, harga diri, maritim, memunggungi, jalesveva jayamahe, jiwa cakrawati, nahkoda, kapal Republik Indonesia, berlayar dan kembangkan layar.

Wacana dalam Pidato Politik Presiden Joko Widodo

Wacana sesungguhnya dimaknai sebagai kata-kata khusus yang dipilih untuk menyatakan makna. Wacana dibentuk oleh sekelompok urutan tanda-tanda, pernyataan dan dapat ditugaskan eksistensi modalitas tertentu (Wiradnyana, 2018:36). Dalam analisis Foucault, wacana dianalisis berdasarkan persebarannya. Wacana dihadapi sebagaimana ia menampilkan diri dalam realitas sebagai media dalam penyebaran pengetahuan dan kekuasaan. Realitas sosial sesungguhnya dibuat dan dihasilkan melalui wacana (Helena dan Michael, 2015:756)

Ada beberapa ungkapan Jokowi yang sesungguhnya ingin menyatakan makna persatuan. Jokowi mengumandangkan gotong royong, kerja sama, dan kerja keras demi mencapai persatuan. Makna bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar juga diungkapkan Jokowi dalam pidatonya yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara maritim, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan, dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Dengan mewujudkan persatuan melalui gotong royong, kerja sama dan kerja keras maka dengan sendirinya pula terjadi peningkatan akan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wacana tentang persatuan yang dimunculkan Jokowi dalam pidato pelantikan presiden menampilkan wujud kekuasaan yang akan direalisasikan dalam kepemimpinannya. Dengan disampaikannya wacana persatuan dan gotong royong presiden Jokowi telah merekonstruksi sebuah pengetahuan yang akan mampu memberikan sebuah pernyataan tentang kerja sama yang harus dibangun oleh masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Kekuasaan dalam Pidato Politik Presiden Joko Widodo

1. Kekuasaan adalah Sebuah Strategi

Kekuasaan Jokowi tampil dalam wacana yang disampaikannya dan pengaruh dari wacana yang diungkapkan dalam pidatonya. Kekuasaan Jokowi dilihat dari strategi yang diterapkannya dalam masyarakat. Bagi Foucault, kekuasaan tampil sebagai yang terlihat baik dan diterima karena kekuasaan tidak hanya tampil sebagai kekuatan yang berkata tidak, namun ia juga melintasi dan memproduksi benda-benda, menginduksi kesenangan, membentuk pengetahuan dan memproduksi wacana (Santosa, 2002:148). Sebagai seorang pemimpin, kekuasaan Jokowi bekerja melalui ungkapan-ungkapan

yang dikeluarkannya dimana ia membuat pemisahan, pembatasan, dan membentuk pengetahuan tersendiri dalam tubuh masyarakat karena sesungguhnya kekuasaan bekerja dalam pembatasan, pemisahan dan penyatuan diskursus-diskursus yang membentuk pengetahuan.

Dalam menyampaikan pidatonya, Jokowi menjadikan pendengar sebagai obyek dari pengetahuannya sehingga terdapat fungsi kontrol dalam kekuasaan yang akan dijalankannya. Foucault juga menyelidiki bagaimana pengetahuan bekerja membentuk kekuasaan melalui kontrol yang menjadikan manusia sebagai obyek dari pengetahuan dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan dalam mengontrol subyek. Pada saat Jokowi menyuarakan untuk melaksanakan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat yang ada di republik Indonesia, maka dengan demikian kekuasaan Jokowi dapat bekerja karena Foucault menyatakan bahwa kekuasaan dapat digunakan dan dijalankan melalui jaringan seperti organisasi (Santosa, 2002:122). Ketika Jokowi menyampaikan strategi serta visi dan misinya dalam kepemimpinannya untuk lima tahun, maka Jokowi sesungguhnya menyuarakan kekuasaan karena kekuasaan adalah strategi.

2. Kekuasaan Bekerja Melalui Jaringan

Dalam pemikiran Foucault, kekuasaan bukanlah institusi, struktur atau pun kekuatan dalam masyarakat. Baginya kekuasaan tidak selalu beroperasi dalam ranah yang negatif dan represif tetapi sesungguhnya kekuasaan itu berada pada tataran positif dan produktif dimana kekuasaan selalu menciptakan pengetahuan yang kemudian memunculkan kebenarannya sendiri. Pengetahuan menyokong kebenaran dan kebenaran menopang pengetahuan (Wiradnyana, 2018:13). Dalam pidatonya, presiden Jokowi telah menciptakan pengetahuan-pengetahuan yang pada akhirnya mampu mempengaruhi praktek hidup masyarakat dan menjadi titik tolak kebenaran yang tersebar dalam tubuh masyarakat. Jokowi memberikan ungkapan untuk mengajak seluruh lembaga negara ikut bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan dia memberikan sebuah keyakinan bahwa negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh konstitusi. Ungkapan-ungkapan itu mengandung makna persuasif dimana secara tidak langsung ia menyebarkan kekuasaannya dengan membangun kesadaran dalam tubuh masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

Dengan terpengaruhnya masyarakat akan apa yang diungkapkan presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya maka dengan sendirinya kekuasaan Jokowi telah bekerja dalam tubuh masyarakat. Dalam memproduksi kekuasaan, Jokowi juga menggunakan jaringan-jaringan yang ada dalam kepemimpinannya. Dalam memainkan kekuasaan, sesungguhnya modal sosial dan jaringan sangat dibutuhkan sehingga kekuasaan itu dapat berperan dengan baik (Rosa, 2006:10). Seturut dengan pemikiran Foucault, kekuasaan itu bersifat jaringan dan menyebar kemana-mana maka yang dilakukan Jokowi pun demikian. Dalam kepemimpinannya Jokowi berusaha untuk memanfaatkan segala jaringan yang dimilikinya dalam masyarakat. Ia berusaha memberdayakan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat untuk menjalankan masa kepemimpinannya. Dengan asas gotong royong, dalam pidatonya Jokowi mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

3. Kekuasaan Bersifat Produktif

Dengan memberikan ide dan gagasan serta membentuk pengetahuan dalam masyarakat lewat pidato politiknya, sesungguhnya kekuasaan Joko Widodo telah

terkonstruksi dan bekerja dalam tubuh masyarakat. Pengetahuan bekerja membentuk kekuasaan melalui kontrol yang menjadikan manusia sebagai obyek dari pengetahuan dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan dalam mengontrol subyek. Pengetahuan merupakan suatu domain yang sangat penting untuk terbentuknya suatu tindakan seseorang (Juwono, 2014: 286). Bertumbuhnya pemahaman dalam diri masyarakat maka meningkatkan kesadaran dalam tubuh masyarakat dan pada akhirnya membawa perubahan terhadap cara pandang masyarakat (Budianto, 2014: 156). Dengan memberikan penekanan pada kerja sama dan gotong royong demi sebuah persatuan dan kemakmuran maka pengetahuan tersebut akan menjadi sebuah sistem kontrol dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan dalam pemikiran Foucault bukanlah institusi, struktur atau kekuatan dalam masyarakat, kekuasaan tidak selalu beroperasi dalam kawasan yang negatif dan represif namun justru pada tataran positif dan produktif, sebab kekuasaan selalu menciptakan pengetahuan yang pada gilirannya memunculkan kebenaran sendiri (Wiradnyana, 2018:13). Pemikiran Foucault ini tersirat dalam kekuasaan yang diproduksi oleh presiden Joko Widodo dimana ia tidak beroperasi dalam kawasan yang negatif melainkan pada tataran produktif. Presiden Joko Widodo memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Kepemimpinan yang merupakan sebuah praktek disiplin sesungguhnya didasari oleh diskursus atau wacana (Gary dan Angus, 2015:809). Lewat pidatonya Joko Widodo sesungguhnya telah menciptakan pengetahuan bagi masyarakat tentang persatuan, kerja sama dan gotong royong.

Ideologi Joko Widodo dalam Pidato Pelantikan Presiden

Ideologi merupakan sebuah ide yang bermakna gagasan, cita-cita, rancangan yang tersusun dalam pikiran manusia atau perasaan yang benar-benar meliputi pikiran (Arifin, 2015: 131). Ideologi yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo berkaitan dengan pikiran dan penalarannya yang berbentuk gagasan, konsep dan cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai dan asas dari kepemimpinannya. Ideologi yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo dalam pidatonya menjadi rujukan selama masa kepemimpinannya. Dari teks pidato presiden Joko Widodo tersirat makna yang berupa ideologi dengan nilai-nilai persatuan, kerja keras dan gotong royong (Tannaqi, 2016:53). Dari ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam pidato presiden Joko Widodo, maka dapat kita simpulkan bahwa Joko Widodo adalah seseorang yang menganut paham sosialis. Joko Widodo berusaha untuk menghimpun semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia dan dalam pidatonya ia mengajak semua masyarakat untuk bekerja sama membangun Negara Indonesia. Dikatakan sosialis karena Joko Widodo berpegang pada prinsip-prinsip kesederajatan dan pemerataan. Joko Widodo berjanji agar semua masyarakat akan merasakan kinerja pemerintahannya dan ia juga berjanji akan langsung turun ke dalam kehidupan masyarakat.

Joko Widodo Mengamalkan Sila ke 3 dan ke 4 Pancasila

Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan (Poespowardojo, 1991:44). Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas dan menjadi sebuah dasar hukum negara Indonesia. Dalam pidatonya, ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo menyiratkan

makna dan tujuan Pancasila sebagai ideologi negara. Joko Widodo menanamkan persatuan dan gotong royong sebagai dasar kepemimpinannya selama lima tahun.

Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki pertautan dalam idealisasi terhadap nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu semangat gotong royong merupakan fondasi atau cetakan dasar (archetype) dan karakter ideal keindonesiaan. Pancasila bukan saja dasar statis yang mempersatukan, melainkan juga dasar dinamis yang menuntun ke arah mana bangsa Indonesia ini harus berlayar dan kembangkan layar sesuai dengan yang dikatakan Joko Widodo dalam menutup pidatonya. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai terpenting bagi bangsa Indonesia. Dalam menyampaikan pidatonya, presiden Joko Widodo menekankan makna persatuan dan gotong royong agar negara Indonesia mampu menjadi bangsa yang besar dan menemukan eksistensinya dihadapan bangsa-bangsa. Untuk terwujudnya suatu negara organisasi hidup manusia maka harus membentuk persatuan ikatan hidup bersama sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga). Persatuan dan kesatuan dalam bernegara akan bermuara pada kehidupan yang utuh dalam suatu wilayah tertentu. Untuk itu nilai persatuan sebagaimana hakikat sila ketiga perlu ditekankan, bahwa keutuhan rakyat dalam modal pokok keutuhan bangsa Indonesia. Maka merupakan suatu keharusan bahwa negara harus bersifat demokratis, hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin baik secara individu maupun secara bersama (hakikat sila keempat).

Relasi Kuasa Pasca Pidato Politik Presiden Joko Widodo

Wacana dan kekuasaan yang dikonstruksi Joko Widodo dalam menyampaikan pidatonya merupakan sebuah tolok ukur dalam masa kepemimpinannya. Wacana dapat digunakan untuk memperbesar pengaruh kekuasaan (Usrin, 2015:123). Kerja sama dan gotong royong merupakan tema sentral dan wacana utama dalam pidato pelantikan presiden Joko Widodo. Bekerja, bekerja, bekerja merupakan slogan utama presiden Joko Widodo dalam menjalankan kuasa dan kepemimpinannya dalam menahkodai negara Indonesia. Kekuasaan Joko Widodo dilakukan melalui wacana yang disampaikan dalam pidato pelantikannya. Dalam pidato pelantikannya, Joko Widodo juga menekankan tentang kerja sama dan kerja keras. Kerja sama dan kerja keras merupakan sebuah tolok ukur kepemimpinannya selama limat tahun. Kekuasaan Joko Widodo dijalankan melalui jaringan-jaringan dan strategi-strategi yang diaturnya selama masa kepemimpinannya. Selama masa kepemimpinannya terdapat banyak hal yang dilakukannya. Kekuasaan Joko Widodo bersifat produktif dan mendisiplinkan tubuh-tubuh dalam masyarakat.

Joko Widodo memainkan kekuasaannya melalui strategi-strategi yang ditargetkannya selama masa kepemimpinannya. Kekuasaan Joko Widodo berperan melalui setiap kebijakan yang diambilnya dan strategi yang dibuatnya. Dalam masa kepemimpinannya selama empat tahun, presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet kerja sebanyak empat kali. Dalam kepemimpinannya, Joko Widodo selalu menggunakan pendekatan yang persuasif dan tidak represif. Mengenai hal ini, wakil presidennya yang adalah Jusuf Kalla juga mengungkapkannya bahwa gaya kepemimpinan Joko Widodo tidak otoriter. Jusuf Kalla sendiri memberikan pengakuan bahwa Joko Widodo tidak otoriter dan tidak melakukan nepotisme. Jusuf Kalla mencontohkan bahwa presiden Joko Widodo sangat demokratis dalam menjalankan masa kepemimpinannya.

PENUTUP

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Teks dalam penelitian ini merupakan bentuk dari pemahaman melalui isi pidato yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo pada saat pelantikan presiden pada

tanggal 20 oktober 2014 dengan berlandaskan pada pemikiran Michel Foucault tentang wacana dan kekuasaan menggunakan metode analisis wacana kritis Teun van Dijk pada level teks.

- Dalam pidatonya, Jokowi telah membentuk wacana dan kekuasaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi praktek sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
- Jokowi telah membangun makna wacana dan kekuasaan demi mencapai target kepemimpinannya selama lima tahun yaitu persatuan, kerja keras dan gotong royong. Wacana tersebut pada akhirnya tersebar menjadi pengetahuan yang tersebar dalam tubuh masyarakat.
- Konstruksi kekuasaan dalam pidato politik Jokowi termanifestasi dalam bentuk persuasif, kontrol sosial, normalisasi dan bersifat jaringan yang menyebar luas ke seluruh elemen masyarakat Indonesia.
- Wacana dan kekuasaan yang tersirat dalam pidato yang disampaikan Jokowi menjadi sebuah tolak ukur dalam kepemimpinannya dan praktek hidup sosial masyarakat sehari-hari di mana kerja keras dan gotong royong serta persatuan harus selalu ditanamkan demi mencapai Indonesia yang makmur.

DAFTAR RUJUKAN

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online atau dalam jaringan (daring).

Buku:

- Agusta, Ivanovich. (2014). *Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan*. Obor. Jakarta.
- Anderson, Gary and Angus Shiva Mungal. (2015). *Discourse Analysis and The Study of Educational Leadership*. International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited. Vol. 29, No. 7, pp. 807-818. ISSN 0951-354X.
- Arifin, Anwar. (2003) *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik di Indonesia*. PT. Balai Pustaka. Jakarta.
- _____. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Barker, Chris. (2000). *Cultural Studies: Theory and Practice*. Sage. London.
- Budianto, Heri. (2014). *Jurnal Visi Komunikasi: Strategi Penanganan Krisis Partai dari Pandangan Publik*. Vol. 13, No. 01, pp. 154-168.
- Chen, Rosa Hong. (2006). *Analyzing Discourse to Uncover Power Relations in Verse: a Critical Lens for Translating Classical Chinese Poetry*. Journal of Canadian Bussines & Current Affairs Database. Vol. 38, No. 4, pp. 8-14.
- Djajasudarma, T. Fatimah. (2010). *Wacana : Pemahaman dan Hubungan Antarunsur*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Foucault, Michel. (1989). *Archaeology of Knowledge*, terjemahan Inggris oleh A.M. Sheridan Smith. Routledge. London.
- _____. (1993) *Histoire de la Sexualité*. Gallimard. Paris. Terjemahan Indonesia, Rahayu S. Hidayat. (2000). *Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Heizmann, Helena and Michael R. Olsson. (2015). *Power Matters: The Importance of Foucault's Powe/Knowledge as a Conceptual Lens in KM Research and Practice*. Journal of Knowledge Management, Emerald Group Publishing Limited. Vol. 19, No. 4, pp. 756-769. ISSN 1367-3270.
- Jorgensen, Marianne W dan Louise J. Phillips. (2007). *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Maarif, Zainul Maarif. (2015). *Retorika: Metode Komunikasi Publik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Maksum, Ali. (2008). *Pengantar Filsafat dari Masa Klasik hingga Postmodernisme*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Malika, Ustin. (2015). *Jurnal Ilmiah Nosi: Penggunaan Bahasa Presiden Joko Widodo dalam Teks Pidato Tahun 2015*. Vol. 3, No. 1, pp. 121-141.
- Martono, Nanang. (2014). *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman dan Seksualitas*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sharififar, Massoud and Elahe Rahimi. (2015). *Critical Discourse Analysis of Political Speeches: A Case Study of Obama's and Rouhani's Speeches at UN*. *Journal of Theory and Practice in Language Studies*. Vol. 5, No. 2, pp. 343-349. ISSN 1779-2591.
- Soerjanto, Poespowardojo. (1991). *Pancasila Sebagai Ideology Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, dalam Alfian & Oetomo, eds. 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. BP-7 Pusat. Jakarta.
- Tannaqi, Nadia. (2016). *Jurnal Ilmiah: Ideologi dalam Teks Pidato Ir. H. Joko Widodo (Analisis Wacana Pidato Politik Pertama Presiden Ir. H. Joko Widodo Pada Saat Pelantikan Presiden)*.
- Tri Atmodjo, Juwono. (2014). *Jurnal Visi Komunikasi: Dinamika Partisipasi Politik Remaja Melalui Media Sosial*. Vol. 13, No. 2, pp. 281-295.
- Van Dijk, Teun. (1995). *News as Discourse*. Lawrence Erlbaum Associates Publisher. New Jersey.
- Wiradnyana, Ketut. (2018). *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta.

Internet:

- https://id.wikipedia.org/wiki/Pelantikan_Presiden_Joko_Widodo, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.
- <https://news.detik.com/berita/2723911/ini-pidato-lengkap-jokowi-saat-pelantikan-presiden>, diakses pada tanggal 28 Juli 2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Jalesveva_Jayamahe, diakses pada tanggal, 23 Oktober 2018.
- <https://www.kompasiana.com/aznil/56259e3a109773f10b3673f0/30-prestasi-gila-presiden-jokowi-1-tahun?page=all>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
- <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14114711/4-tahun-jokowi-jk-dan-bongkar-pasang-kabinet-kerja>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-4440964/jk-contohkan-gaya-kepemimpinan-jokowi-yang-tak-otoriter-dan-nepotisme>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019.
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/12/jokowi-presiden-yang-mendobrak-tradisi-kekuasaan-yang-selama-ini-didominasi-elite-politik-lama>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019.